

Dinamika Perjanjian Abraham Terhadap Pola Hubungan Regional Tahun 2026

Saisa Briyanti¹, Septianis Afifah²

^{1,2} Prodi Hubungan Internasional, Universitas Al-Ghifari Bandung
e-mail: saisabriyanti19@gmail.com¹, septianisafipah1990@gmail.com²

Abstrak

Perjanjian Abraham yang ditandatangani sejak tahun 2020 menjadi salah satu transformasi geopolitik paling signifikan di kawasan Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Kesepakatan ini melibatkan Israel dengan sejumlah negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, melalui fasilitasi Amerika Serikat sebagai bagian dari normalisasi hubungan diplomatik dan keamanan regional. Dinamika politik kawasan pasca Arab Spring, meningkatnya ancaman keamanan regional, serta rivalitas terhadap Iran mendorong negara-negara Arab membangun pola hubungan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika Perjanjian Abraham terhadap pola hubungan regional Timur Tengah tahun 2026 menggunakan pendekatan Regional Security Complex Theory. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan memanfaatkan dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan lembaga internasional sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Abraham tidak hanya menghasilkan normalisasi diplomatik, tetapi juga membentuk konfigurasi aliansi baru yang memperkuat kerja sama keamanan, ekonomi, teknologi, dan pertahanan di kawasan Timur Tengah. Selain itu, terjadi perubahan pola amity dan enmity yang memperlihatkan pergeseran orientasi politik negara-negara Arab dari solidaritas ideologis menuju pragmatisme geopolitik. Keterlibatan Amerika Serikat sebagai aktor eksternal turut memengaruhi distribusi kekuasaan regional, terutama dalam upaya menyeimbangkan pengaruh Iran di kawasan. Meskipun demikian, konflik Gaza dan isu Palestina tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan stabilitas regional secara menyeluruh.

Kata kunci: Abraham Accords, Timur Tengah, Keamanan Regional, Aliansi Strategis, Iran

Abstract

The Abraham Accords, signed since 2020, have become one of the most significant geopolitical transformations in the Middle East over the last few decades. The agreement involved Israel and several Arab states, including the United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, and Sudan, under the facilitation of the United States as part of diplomatic normalization and regional security cooperation. The political dynamics of the post-Arab Spring era, increasing regional security threats, and rivalry toward Iran encouraged Arab states to establish more

pragmatic patterns of relations oriented toward regional stability. This study aims to analyze the dynamics of the Abraham Accords toward regional relationship patterns in the Middle East in 2026 using the Regional Security Complex Theory approach. This study employed a descriptive qualitative method through library research by utilizing official documents, scientific journals, academic articles, and reports from international institutions as the primary data sources. The findings indicate that the Abraham Accords have not only created diplomatic normalization but also formed a new alliance configuration that strengthens security, economic, technological, and defense cooperation in the Middle East region. Furthermore, changes in the patterns of amity and enmity demonstrate a shift in the political orientation of Arab states from ideological solidarity toward geopolitical pragmatism. The involvement of the United States as an external actor also influences the regional distribution of power, particularly in balancing Iran's influence in the region. Nevertheless, the Gaza conflict and the Palestinian issue remain major challenges to achieving comprehensive regional stability.

Keywords: Abraham Accords, Middle East, Regional Security, Strategic Alliances, Iran

LATAR BELAKANG

Kawasan Timur Tengah selama beberapa dekade dikenal sebagai kawasan dengan kompleksitas keamanan regional yang tinggi akibat konflik berkepanjangan, rivalitas geopolitik, serta keterlibatan aktor eksternal dalam dinamika kawasan. Konflik Israel–Palestina, rivalitas Iran dengan negara-negara Teluk, hingga intervensi Amerika Serikat menjadi faktor utama yang membentuk pola hubungan antarnegara di kawasan tersebut. Dalam kondisi tersebut, penandatanganan *Abraham Accords* pada tahun 2020 menjadi salah satu perubahan geopolitik paling signifikan dalam hubungan Arab-Israel. Perjanjian ini melibatkan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan melalui fasilitasi Amerika Serikat sebagai upaya normalisasi hubungan diplomatik dan kerja sama regional (U.S. Department of State, 2020).

Sebelum terbentuknya *Abraham Accords*, hubungan negara-negara Arab dengan Israel didominasi oleh pola permusuhan *enmity* akibat isu Palestina yang belum terselesaikan. Namun, dinamika geopolitik pasca *Arab Spring* mulai mengubah orientasi politik negara-negara Teluk menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada stabilitas kawasan. Meningkatnya ancaman keamanan regional, khususnya terhadap pengaruh Iran, mendorong negara-negara Arab untuk membangun pola kerja sama baru dengan Israel (Middle East Institute, 2024). Ancaman Iran dipandang sebagai faktor yang mempercepat terbentuknya aliansi strategis antara Israel dan negara-negara Teluk, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan regional. Dengan demikian, *Abraham Accords* tidak hanya dipahami sebagai bentuk normalisasi diplomatik, tetapi juga sebagai bagian dari strategi geopolitik kawasan dalam menghadapi perubahan distribusi kekuasaan di Timur Tengah.

Selain aspek keamanan, *Abraham Accords* juga menghasilkan peningkatan kerja sama ekonomi dan teknologi antarnegara. Normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain membuka peluang investasi, perdagangan, serta pengembangan teknologi di berbagai sektor strategis (American Jewish Committee, 2024). Hubungan ekonomi tersebut

memperlihatkan adanya perubahan pola hubungan regional dari yang sebelumnya berbasis konflik menuju kerja sama yang lebih pragmatis. Namun demikian, perjanjian ini juga menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan akar utama konflik di kawasan, yaitu persoalan Palestina. Konflik Gaza sejak tahun 2023 menunjukkan bahwa normalisasi hubungan Arab-Israel belum mampu menciptakan stabilitas kawasan secara menyeluruh (The Washington Institute, 2025). Beberapa negara Arab bahkan menghadapi tekanan domestik akibat meningkatnya solidaritas masyarakat terhadap Palestina.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pola hubungan regional di Timur Tengah mengalami perubahan yang semakin kompleks hingga tahun 2026. Negara-negara Arab di satu sisi memperkuat kerja sama strategis dengan Israel, tetapi di sisi lain tetap menghadapi tekanan politik domestik dan regional terkait isu Palestina. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat sebagai aktor eksternal turut memengaruhi konfigurasi aliansi dan distribusi kekuasaan kawasan. Dalam perspektif *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang dikemukakan oleh Barry Buzan, keamanan regional dipengaruhi oleh pola *amity* dan *enmity* antarnegara serta keterkaitan ancaman di dalam suatu kawasan (Buzan & Wæver, 2003). Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika Perjanjian Abraham terhadap pola hubungan regional tahun 2026 menjadi penting untuk memahami perubahan konfigurasi aliansi, pola hubungan antarnegara, serta transformasi keamanan regional di kawasan Timur Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan analisis untuk memahami dinamika *Abraham Accords* terhadap pola hubungan regional di Timur Tengah tahun 2026. Penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka analisis mengenai perubahan konfigurasi aliansi, keamanan regional, serta pola hubungan antarnegara pasca normalisasi hubungan Arab-Israel.

Penelitian pertama dilakukan oleh Abdullayev (2024) dalam jurnal *Between Peace and Conflict: The Middle East after the Abraham Accords*. Penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang mendorong negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui mediasi Amerika Serikat. Abdullayev (2024) menjelaskan bahwa normalisasi hubungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan diplomasi politik, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan kerja sama militer, keamanan, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, penelitian tersebut menyoroti bagaimana konflik Gaza tahun 2023 memengaruhi keberlangsungan hubungan diplomatik negara-negara penandatangan *Abraham Accords* dengan Israel. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa hubungan normalisasi Arab-Israel membentuk realitas geopolitik baru yang memengaruhi keseimbangan kekuatan regional di Timur Tengah serta mengubah pola aliansi dan permusuhan antarnegara (Abdullayev, 2024).

Penelitian kedua berasal dari laporan Middle East Institute yang berjudul *The Abraham Accords Backgrounder*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *Abraham Accords* menjadi bagian dari strategi geopolitik negara-negara Teluk dalam menghadapi ancaman keamanan regional, khususnya terhadap pengaruh Iran di Timur Tengah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya ancaman Iran pasca *Arab Spring* mendorong negara-negara Arab untuk membangun hubungan yang lebih pragmatis dengan Israel. Selain itu, normalisasi hubungan

juga dipandang sebagai upaya memperkuat stabilitas regional melalui kerja sama keamanan, ekonomi, dan teknologi yang difasilitasi oleh Amerika Serikat (Middle East Institute, 2024).

Penelitian ketiga berasal dari laporan The Washington Institute berjudul *Abraham Accords at Five Years: Resilience and Roadblocks*. Kajian tersebut menjelaskan bahwa *Abraham Accords* berhasil menciptakan peningkatan kerja sama ekonomi dan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab, terutama Uni Emirat Arab dan Bahrain. Namun demikian, penelitian tersebut juga menyoroti adanya tantangan serius terhadap keberlanjutan normalisasi hubungan akibat konflik Gaza sejak tahun 2023. Tekanan domestik di negara-negara Arab serta meningkatnya solidaritas publik terhadap Palestina menjadi hambatan bagi proses normalisasi hubungan dengan Israel (Atlantic Council, 2025).

Penelitian keempat berasal dari dokumen resmi *Abraham Accords Declaration* yang diterbitkan oleh U.S. Department of States. Dokumen tersebut berisi kesepakatan resmi mengenai normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab, termasuk deklarasi kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, teknologi, investasi, dan perdamaian regional. Selain itu, dokumen resmi tersebut juga memuat *joint statement*, perjanjian bilateral, serta bentuk kerja sama strategis yang menjadi dasar terbentuknya hubungan baru antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam penelitian ini, dokumen resmi *Abraham Accords* digunakan sebagai data primer untuk menganalisis dinamika hubungan regional serta perubahan pola aliansi keamanan di Timur Tengah tahun 2026 (U.S. Department of State, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis menemukan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normalisasi diplomatik dan kerja sama bilateral antara Israel dengan negara-negara Arab. Sementara itu, penelitian mengenai perubahan pola hubungan regional, konfigurasi aliansi keamanan, serta dinamika *amity* dan *enmity* di Timur Tengah pasca *Abraham Accords* hingga tahun 2026 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menggunakan pendekatan *Regional Security Complex Theory* (RSCT) untuk menganalisis perubahan pola hubungan regional dan distribusi kekuasaan di kawasan Timur Tengah secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami serta menafsirkan dinamika hubungan internasional yang terjadi dalam fenomena *Abraham Accords* dan pengaruhnya terhadap pola hubungan regional di Timur Tengah tahun 2026. Penelitian kualitatif berupaya memahami makna, proses, serta konteks dari suatu fenomena sosial dan politik secara mendalam melalui interpretasi terhadap data-data yang relevan (Bakry, 2016). Pendekatan ini digunakan karena dinamika keamanan regional Timur Tengah tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik, melainkan memerlukan pemahaman terhadap pola hubungan, kepentingan politik, dan perubahan konfigurasi aliansi antarnegara di kawasan.

Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada penjabaran data secara sistematis dan faktual terhadap fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis perubahan pola hubungan regional pasca

penandatanganan *Abraham Accords* dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah yang relevan (Arsyam, 2020). Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengidentifikasi dinamika kerja sama dan rivalitas antarnegara di Timur Tengah, khususnya antara Israel, negara-negara Teluk, Iran, dan keterlibatan Amerika Serikat sebagai aktor eksternal kawasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka melalui penelitian berbasis internet dan dokumen resmi. Penelitian berbasis internet digunakan untuk memperoleh data aktual berupa artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, buku elektronik, dokumen kebijakan, dan berita internasional yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan seleksi terhadap sumber berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan validitas data agar informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi *Abraham Accords Declaration* yang diterbitkan oleh *U.S. Department of States* sebagai dokumen utama yang memuat isi perjanjian, *joint statement*, serta bentuk kerja sama strategis antara Israel dan negara-negara Arab. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga internasional, serta publikasi penelitian yang membahas dinamika geopolitik dan keamanan regional Timur Tengah. Beberapa sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Middle East Institute, The Washington Institute, dan Atlantic Council yang secara khusus membahas perkembangan *Abraham Accords* dan dampaknya terhadap kawasan Timur Tengah.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta empiris terhadap kerangka teori yang digunakan. Penulis menganalisis perubahan pola hubungan regional melalui identifikasi kerja sama dan rivalitas (antarnegara di Timur Tengah pasca-*Abraham Accords*). Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana keterlibatan Amerika Serikat sebagai aktor eksternal memengaruhi distribusi kekuasaan (*distribution of power*) di kawasan Timur Tengah hingga tahun 2026.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver untuk menganalisis dinamika Perjanjian Abraham terhadap pola hubungan regional di Timur Tengah tahun 2026. RSCT merupakan teori keamanan regional yang menjelaskan bahwa keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara-negara lain yang berada dalam satu kawasan geografis yang sama (Buzan & Wæver, 2003). Dalam perspektif ini, ancaman keamanan cenderung bersifat regional karena kedekatan geografis menyebabkan negara-negara saling terhubung dalam pola kerja sama maupun rivalitas keamanan.

Menurut Buzan dan Wæver (2003), keamanan regional dipengaruhi oleh pola hubungan *amity* dan *enmity* antarnegara. *Amity* merujuk pada hubungan yang dibangun atas dasar kerja sama, kedekatan politik, serta kepentingan keamanan bersama, sedangkan *enmity* menggambarkan hubungan yang didasarkan pada kecurigaan, rivalitas, dan ancaman keamanan. Dalam konteks *Abraham Accords*, pola *amity* terlihat melalui normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan yang berorientasi pada

kerja sama ekonomi, teknologi, dan keamanan regional. Sebaliknya, pola *enmity* masih terlihat dalam hubungan Israel dengan Iran serta kelompok pro-Palestina yang menolak normalisasi hubungan tersebut.

Selain pola *amity* dan *enmity*, RSCT juga menekankan pentingnya distribusi kekuasaan dalam suatu kawasan. Distribusi kekuasaan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk keterlibatan kekuatan besar dunia dalam dinamika regional (Buzan & Wæver, 2003). Dalam kasus *Abraham Accords*, keterlibatan Amerika Serikat sebagai mediator utama menunjukkan bagaimana aktor eksternal dapat memengaruhi konfigurasi aliansi dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Amerika Serikat tidak hanya berperan sebagai fasilitator diplomasi, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mendorong pembentukan kerja sama keamanan regional untuk membendung pengaruh Iran di kawasan.

Melalui pendekatan RSCT, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana *Abraham Accords* membentuk pola hubungan regional baru di Timur Tengah tahun 2026, baik melalui penguatan kerja sama strategis antarnegara maupun melalui munculnya rivalitas baru yang memengaruhi stabilitas kawasan. Dengan demikian, teori ini dinilai relevan untuk menjelaskan perubahan konfigurasi keamanan regional dan distribusi kekuasaan di Timur Tengah pasca normalisasi hubungan Arab–Israel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Pola Hubungan Regional Pasca-Abraham Accords

Perjanjian Abraham menjadi salah satu perubahan geopolitik paling signifikan dalam dinamika hubungan regional Timur Tengah sejak ditandatangani pada tahun 2020. Perjanjian ini menandai normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Sebelum adanya perjanjian tersebut, hubungan antara negara-negara Arab dan Israel didominasi oleh pola permusuhan akibat konflik Palestina–Israel yang berlangsung sejak pertengahan abad ke-20. Solidaritas negara-negara Arab terhadap Palestina menjadi dasar utama penolakan terhadap keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah. Namun, perubahan kondisi keamanan kawasan, ancaman geopolitik, serta kebutuhan kerja sama ekonomi mendorong negara-negara Arab mulai mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Dalam perspektif *Regional Security Complex Theory* (RSCT), perubahan ini menunjukkan adanya transformasi pola *amity* dan *enmity* dalam hubungan keamanan kawasan. Barry Buzan dan Ole Wæver menjelaskan bahwa persepsi ancaman bersama dapat membentuk konfigurasi aliansi baru antarnegara dalam suatu kawasan keamanan regional. Dalam konteks Abraham Accords, Iran dipandang sebagai ancaman kolektif oleh Israel dan negara-negara Teluk sehingga mendorong terbentuknya pola kedekatan baru di Timur Tengah (Buzan & Wæver, 2003). Dengan demikian, Abraham Accords tidak hanya menjadi perjanjian diplomatik biasa, tetapi juga simbol perubahan struktur hubungan regional Timur Tengah menuju pola kerja sama strategis berbasis kepentingan keamanan dan ekonomi.

Transformasi hubungan regional pasca-Abraham Accords juga dipengaruhi oleh meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat dalam politik keamanan kawasan Timur Tengah. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, Amerika Serikat mulai melihat Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan kepentingannya di Timur Tengah. Revolusi tersebut

mengubah Iran dari sekutu utama Amerika Serikat menjadi negara yang bersikap anti-Barat dan anti-Israel. Kondisi ini memperkuat pembentukan blok kekuatan di kawasan antara negara-negara yang mendukung Amerika Serikat dan kelompok yang berseberangan dengan kepentingan Barat. Fred Halliday menjelaskan bahwa keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah merupakan bagian dari upaya mempertahankan pengaruh geopolitik global serta menjaga keseimbangan kekuasaan kawasan (Halliday, 2005). Selain itu, Amerika Serikat bersama Israel memiliki kepentingan strategis yang sama dalam membatasi pengaruh Iran, terutama setelah Iran aktif mengembangkan teknologi nuklir pasca-revolusi. Program nuklir Iran diklaim sebagai kebutuhan energi sipil, namun banyak negara Barat menilai program tersebut berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata pemusnah massal (Katzman et al., 2021). Pada era George W. Bush, Iran bahkan dikenai embargo ekonomi dan sanksi internasional akibat pengembangan nuklirnya. Situasi tersebut memperkuat persepsi ancaman terhadap Iran di kawasan Timur Tengah. Oleh sebab itu, normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab melalui Abraham Accords menjadi salah satu instrumen strategis Amerika Serikat untuk membangun poros keamanan baru di kawasan.

Selain faktor keamanan, transformasi hubungan regional juga dipengaruhi oleh perubahan orientasi politik luar negeri negara-negara Arab. Uni Emirat Arab dan Bahrain mulai melihat Israel sebagai mitra strategis dalam bidang ekonomi, teknologi, keamanan siber, hingga investasi regional. Kerja sama yang dibangun tidak lagi terbatas pada diplomasi formal, tetapi berkembang ke sektor perdagangan, energi, teknologi pertanian, keamanan maritim, serta pertahanan kawasan. Muriel Asseburg dan Sarah Henkel menjelaskan bahwa Abraham Accords mencerminkan perubahan pendekatan politik negara-negara Arab dari orientasi ideologis menuju orientasi pragmatis berbasis kepentingan nasional (Asseburg & Henkel, 2021). Dalam praktiknya, negara-negara Teluk memanfaatkan hubungan dengan Israel untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan keamanan mereka, terutama menghadapi ancaman rudal dan pengaruh regional Iran. Kerja sama militer bahkan berkembang dalam bidang sistem pertahanan udara, keamanan maritim, serta pengembangan teknologi anti-rudal antara Israel dan negara-negara Teluk (Saab, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa pola hubungan regional di Timur Tengah mulai bergeser dari solidaritas politik terhadap Palestina menuju kepentingan keamanan bersama. Di sisi lain, hubungan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan kawasan Timur Tengah semakin dipengaruhi oleh distribusi kekuatan teknologi dan militer. Oleh karena itu, Abraham Accords menjadi titik awal pembentukan hubungan regional baru yang lebih rasional dan strategis di Timur Tengah.

Meskipun demikian, perubahan hubungan regional tersebut juga memunculkan fragmentasi dan polarisasi baru di kawasan Timur Tengah. Iran, Suriah, dan kelompok-kelompok pro-Palestina memandang Abraham Accords sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Aziz Ur Rehman menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dipandang sebagai instrumen konsolidasi kekuatan Amerika Serikat dan Israel untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah (Rehman, 2020). Palestina sendiri memberikan respons yang tidak stabil terhadap normalisasi hubungan tersebut akibat kondisi politik internal yang terpecah antara Fatah dan Hamas. Massimiliano Fiore menjelaskan bahwa perpecahan politik Palestina menyebabkan tidak adanya strategi bersama dalam menghadapi perubahan geopolitik kawasan pasca-Abraham Accords (Fiore, 2020). Di sisi lain, normalisasi hubungan

diplomati belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat akar rumput di negara-negara Arab. Norlen dan Sinai menjelaskan bahwa hubungan damai yang dibangun pada tingkat pemerintahan tidak selalu diikuti oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap Israel (Norlen & Sinai, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Abraham Accords belum mampu menyelesaikan akar konflik historis Palestina-Israel secara menyeluruh. Dengan demikian, transformasi hubungan regional pasca-Abraham Accords memperlihatkan dualitas antara upaya stabilisasi kawasan melalui kerja sama strategis dan meningkatnya polarisasi geopolitik di Timur Tengah.

2. Pembentukan Aliansi Strategis Dan Distribusi Kekuasaan Regional

Abraham Accords juga mendorong terbentuknya aliansi strategis baru yang memengaruhi distribusi kekuasaan regional Timur Tengah hingga tahun 2026. Sebelum normalisasi hubungan terjadi, Israel cenderung berada dalam posisi terisolasi di kawasan akibat konflik berkepanjangan dengan negara-negara Arab. Namun, pasca-Abraham Accords, Israel berhasil memperoleh legitimasi diplomatik dan memperluas pengaruh strategisnya di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam pembentukan aliansi tersebut melalui mediasi diplomatik dan dukungan keamanan kepada negara-negara yang terlibat dalam perjanjian. Dalam perspektif RSCT, pembentukan aliansi keamanan baru merupakan respons terhadap persepsi ancaman bersama yang dirasakan oleh negara-negara kawasan. Iran diposisikan sebagai ancaman utama akibat pengaruh regionalnya yang semakin luas melalui program nuklir, pengembangan rudal balistik, dan dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan terhadap Iran menjadi semakin agresif melalui tekanan maksimum dan pengetatan terhadap *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. Amerika Serikat tidak hanya menyoroti program nuklir Iran, tetapi juga pengembangan rudal balistik dan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di kawasan (Katzman et al., 2021). Situasi ini mempercepat terbentuknya kerja sama keamanan antara Israel dan negara-negara Teluk. Oleh sebab itu, Abraham Accords berkembang menjadi instrumen pembentukan blok keamanan baru di Timur Tengah.

Pembentukan aliansi strategis tersebut terlihat dari meningkatnya kerja sama pertahanan dan militer antara Israel dan negara-negara Teluk. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran intelijen, latihan militer bersama, pengembangan teknologi keamanan siber, sistem pertahanan udara, hingga pengawasan maritim di kawasan Teluk dan Laut Merah. Saab menjelaskan bahwa fokus utama kerja sama pertahanan tersebut adalah membangun sistem perlindungan terhadap ancaman rudal dan ekspansi militer Iran di kawasan (Saab, 2022). Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain mulai meningkatkan impor persenjataan serta mengembangkan industri pertahanan domestik sebagai bagian dari strategi swasembada militer. Selain itu, kerja sama keamanan ini memperlihatkan bahwa Israel mulai diterima sebagai mitra strategis utama oleh sebagian negara Arab. Di sisi lain, Iran merespons perkembangan tersebut dengan memperkuat hubungan strategis bersama Rusia dan China sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan regional. Polarisasi ini memperlihatkan terbentuknya dua poros utama di Timur Tengah, yaitu blok pro-normalisasi yang dipimpin Israel dan negara-negara Teluk serta blok resistensi yang dipimpin Iran. Dengan demikian, Abraham Accords telah mengubah struktur distribusi kekuasaan regional dari pola

konflik tradisional menuju kompetisi geopolitik berbasis aliansi strategis dan teknologi keamanan.

Perubahan distribusi kekuasaan kawasan juga dipengaruhi oleh dinamika konflik regional yang terus berlangsung, khususnya konflik Suriah dan Palestina. Dalam Perang Suriah, pola *amity* dan *enmity* terlihat melalui keterlibatan berbagai aktor regional dan global dalam mendukung pihak yang berbeda. Pemerintah Suriah mendapat dukungan langsung dari Iran dan Rusia, sementara kelompok oposisi memperoleh bantuan dari Turki, Amerika Serikat, dan beberapa negara Arab (Mudore & Safitri, 2019). Kompleksitas hubungan tersebut menunjukkan bahwa keamanan Timur Tengah memiliki keterkaitan yang sangat kuat antarnegara dan antaraktor regional. Abraham Accords semakin memperjelas pembentukan blok-blok kekuatan di kawasan yang sebelumnya sudah muncul akibat konflik Suriah dan rivalitas Iran-Arab Saudi. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai mengurangi keterlibatan militer langsungnya di Timur Tengah dan lebih mendorong terbentuknya kerja sama keamanan regional antar sekutunya. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa Abraham Accords menjadi bagian dari restrukturisasi geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah pasca-perang Irak dan Afghanistan. Meskipun demikian, konflik Palestina-Israel yang belum terselesaikan tetap menjadi tantangan utama bagi stabilitas kawasan. Banyak masyarakat Arab masih menolak normalisasi hubungan dengan Israel selama persoalan Palestina belum memperoleh penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, dinamika hubungan regional Timur Tengah tahun 2026 menunjukkan bahwa Abraham Accords berhasil membentuk pola kerja sama strategis baru, namun sekaligus memperkuat polarisasi geopolitik dan kompetisi kekuasaan di kawasan.

3. Perubahan Distribusi Kekuasaan Regional Timur Tengah Tahun 2026

Perjanjian Abraham turut memengaruhi perubahan distribusi kekuasaan di kawasan Timur Tengah hingga tahun 2026. Dalam perspektif *Regional Security Complex Theory* (RSCT), distribusi kekuasaan regional terbentuk melalui interaksi ancaman, kedekatan geografis, dan hubungan keamanan antarnegara. Sebelum Abraham Accords disahkan, rivalitas utama kawasan didominasi oleh persaingan antara Iran dan Arab Saudi sebagai representasi dua kutub kekuatan regional. Namun, setelah normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab terjadi, struktur kekuatan kawasan mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Israel yang sebelumnya relatif terisolasi di Timur Tengah mulai memperoleh legitimasi politik dan posisi strategis baru melalui hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Barry Buzan menjelaskan bahwa perubahan pola aliansi dalam suatu kawasan keamanan dapat mengubah distribusi kekuasaan regional secara menyeluruh (Buzan & Wæver, 2003). Dalam konteks Timur Tengah, normalisasi hubungan tersebut memperlihatkan terbentuknya poros baru yang berorientasi pada kerja sama keamanan, teknologi, dan pertahanan regional. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat sebagai mediator utama memperkuat posisi blok pro-normalisasi dalam struktur keamanan kawasan. Dengan demikian, Abraham Accords menjadi salah satu faktor utama yang mengubah konfigurasi geopolitik Timur Tengah pada tahun 2026.

Perubahan distribusi kekuasaan tersebut terlihat jelas melalui meningkatnya pengaruh strategis Israel di kawasan Timur Tengah. Pasca-Abraham Accords, Israel tidak lagi dipandang semata sebagai aktor konflik, tetapi mulai diterima sebagai mitra strategis dalam

bidang keamanan dan ekonomi regional. Kerja sama antara Israel dan negara-negara Teluk berkembang pesat dalam sektor teknologi pertahanan, keamanan siber, energi, perdagangan, serta investasi strategis. Israel juga memperluas kerja sama pertahanan udara dan sistem anti-rudal bersama negara-negara Teluk sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman Iran. Saab menjelaskan bahwa integrasi pertahanan antara Israel dan negara-negara Arab merupakan salah satu perkembangan keamanan paling penting di Timur Tengah pasca-2020 (Saab, 2022). Selain itu, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain mulai meningkatkan pembelian teknologi militer dan sistem pengawasan dari Israel. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa Israel berhasil memanfaatkan Abraham Accords untuk memperluas pengaruh geopolitik dan ekonominya di kawasan. Di sisi lain, Iran memandang perkembangan ini sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategisnya di Timur Tengah. Oleh sebab itu, distribusi kekuasaan regional tahun 2026 menunjukkan peningkatan pengaruh Israel sebagai aktor utama dalam konfigurasi keamanan Timur Tengah.

Di tengah meningkatnya pengaruh Israel dan negara-negara Teluk, Iran tetap mempertahankan posisinya sebagai kekuatan resistensi regional terhadap dominasi Amerika Serikat dan Israel. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, Iran membangun identitas politik luar negeri yang menolak hegemoni Barat dan mendukung kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah. Program nuklir Iran, pengembangan rudal balistik, serta dukungan terhadap kelompok proksi seperti Hizbullah dan Houthi memperlihatkan upaya Iran mempertahankan pengaruh strategisnya di kawasan. Amerika Serikat memandang langkah tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan keamanan sekutunya di Timur Tengah. Katzman, McInnis, dan Thomas menjelaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran semakin agresif terutama pada era Donald Trump melalui kebijakan *maximum pressure* terhadap program nuklir Iran dan aktivitas regionalnya (Katzman et al., 2021). Tekanan tersebut mendorong Iran memperkuat hubungan strategis dengan Rusia dan China sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan kawasan. Selain itu, konflik Suriah juga memperlihatkan pola kerja sama strategis Iran dan Rusia dalam mendukung pemerintahan Bashar al-Assad. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan regional di Timur Tengah tidak hanya dipengaruhi aktor kawasan, tetapi juga keterlibatan kekuatan global. Dengan demikian, dinamika geopolitik Timur Tengah tahun 2026 memperlihatkan adanya polarisasi kekuatan antara blok pro-normalisasi dan blok resistensi regional.

Meskipun Abraham Accords berhasil menciptakan konfigurasi hubungan baru di Timur Tengah, distribusi kekuasaan kawasan masih diwarnai oleh ketidakstabilan dan konflik berkepanjangan. Konflik Palestina-Israel tetap menjadi isu utama yang belum terselesaikan dan terus memengaruhi legitimasi normalisasi hubungan di kawasan Arab. Banyak masyarakat Arab masih memandang hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk pengabaian terhadap perjuangan Palestina. Norlen dan Sinai menjelaskan bahwa normalisasi hubungan pada tingkat pemerintahan tidak selalu diikuti penerimaan masyarakat secara sosial dan politik (Norlen & Sinai, 2020). Selain itu, konflik Gaza, ketegangan Iran-Israel, serta perang proksi di Suriah dan Yaman menunjukkan bahwa stabilitas kawasan masih sangat rentan. Amerika Serikat juga mulai mengurangi keterlibatan militernya secara langsung di Timur Tengah dan lebih mendorong pembentukan kerja sama keamanan antar sekutunya. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa Abraham Accords menjadi bagian dari restrukturisasi

geopolitik Amerika Serikat di kawasan pasca-perang Irak dan Afghanistan. Di sisi lain, negara-negara Arab mulai mengedepankan kepentingan nasional dan stabilitas ekonomi dibanding solidaritas ideologis tradisional terhadap Palestina. Oleh karena itu, distribusi kekuasaan regional Timur Tengah tahun 2026 memperlihatkan adanya transformasi besar dalam pola hubungan kawasan yang ditandai oleh pembentukan aliansi strategis baru, meningkatnya kompetisi geopolitik, serta perubahan orientasi keamanan regional.

SIMPULAN

Perjanjian Abraham telah mengubah pola hubungan regional Timur Tengah dari dominasi konflik ideologis menuju kerja sama strategis berbasis kepentingan keamanan, ekonomi, dan geopolitik. Abraham Accords memperlihatkan terbentuknya pola amity baru antara Israel dan negara-negara Arab, terutama dalam menghadapi ancaman Iran serta menjaga stabilitas kawasan. Namun, perjanjian ini juga memunculkan polarisasi regional baru antara blok pro-normalisasi dan blok resistensi. Oleh karena itu, negara-negara Timur Tengah perlu memperkuat dialog regional dan tetap mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel secara adil agar stabilitas keamanan kawasan tahun 2026 dapat tercapai secara lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullayev, K. (2024). Arab-Israeli Normalization And The New Geopolitical Reality In The Middle East. *Journal Of Middle Eastern Geopolitics*, 15(2), 55–72.
- American Jewish Committee. (2024). *The Abraham Accords At Four Years: Economic Cooperation And Regional Transformation*.
- Arsyam, M. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Kajian Ilmu Sosial. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 45–58.
- Asseburg, M., & Henkel, S. C. (2021). *The Abraham Accords And The Remaking Of The Middle East*. The Washington Institute For Near East Policy.
- Atlantic Council. (2025). *Middle East Security Cooperation And The Abraham Accords*.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions And Powers: The Structure Of International Security*. Cambridge University Press.
- Fiore, M. (2020). The Palestinian Response Toward Abraham Accords. *Journal Of Middle Eastern Politics And Policy*, 12(3), 44–58.
- Halliday, F. (2005). *The Middle East In International Relations: Power, Politics And Ideology*. Cambridge University Press.
- Katzman, K., Mcinnis, K. J., & Thomas, C. (2021). *Iran, Israel, And U.S. Policy In The Middle East*.
- Middle East Institute. (2024). *Regional Polarization After The Abraham Accords*.
- Mudore, S. B., & Safitri, N. (2019). Pola Amity Dan Enmity Dalam Konflik Suriah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 101–115.
- Norlen, T., & Sinai, J. (2020). Normalization Without Social Acceptance: The Abraham Accords In Arab Society. *Middle East Review*, 14(2), 61–75.
- Rehman, A. U. (2020). *The Abraham Accords And The Geopolitical Shift In The Middle East*.

- Middle East Policy, 27(4), 85–96.
- Saab, B. Y. (2022). The Gulf-Israel Security Partnership After The Abraham Accords.
- The Washington Institute. (2025). Israel-Gulf Relations And Regional Security Dynamics In 2025.
- U.S. Department Of State. (2020). The Abraham Accords Declaration. U.S. Government Publishing Office.